

**PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN PENERAPAN
E-GOVERNMENT BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

M. Raihan Ramadhanito



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN PENERAPAN
E-GOVERNMENT BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh:

M. Raihan Ramadhanito

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh:

M. Raihan Ramadhanito

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat korupsi dan penerapan e-government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat) selama periode 2021-2023. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik sampling jenuh pada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif menggunakan uji beda mann whitney u test. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tingkat korupsi pemerintah daerah yang memiliki opini WTP lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP. Serta penilaian penerapan e-government yang lebih tinggi pada pemerintah daerah yang memiliki opini WTP jika dibandingkan pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WTP.

Kata Kunci: Korupsi,*E-Government*,Opini Laporan Keuangan.

ABSTRACT

COMPARISON OF THE LEVEL OF CORRUPTION AND IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT BASED ON FINANCIAL STATEMENT OPINION IN REGIONAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

By:

M. Raihan Ramadhanito

This research aims to examine differences in the level of corruption and implementation of e-government between local governments that received WTP opinions and opinions other than WTP (WDP, unreasonable, did not express an opinion) during the 2021-2023 period. The sample in this study was selected using a saturated sampling technique for all district/city local governments in Indonesia. The analysis used is a descriptive statistical test using the Mann Whitney U test. This research shows that the level of corruption in local governments that have WTP opinions is lower when compared to local governments that have opinions other than WTP. As well as a higher assessment of the implementation of e-government in local governments that have WTP opinions compared to local governments that have opinions other than WTP.

Keywords: *Corruption, E-Government, Financial Statement Opinion*

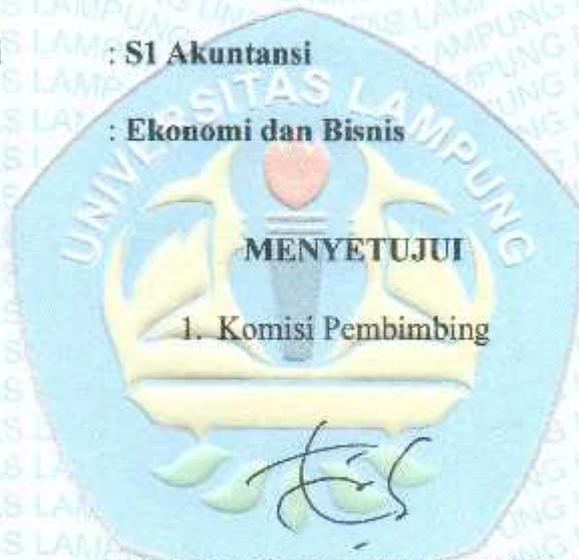
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : ***M. Raihan Ramadhanito***

NPM : **2151031002**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 197108021995122001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti'.

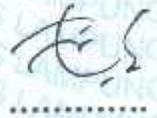
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA

NIP. 197008011995122001

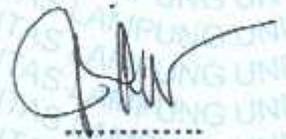
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

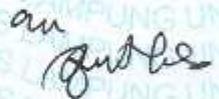
Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt



Penguji Utama : Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.



Penguji Kedua : Kamadie Sumanda, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.

NIP: 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 April 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Raihan Ramadhanito

NPM : 2151031002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perbandingan Tingkat Korupsi dan Penerapan *E-Government* Berdasarkan Opini Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari ditemukan terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 April 2025

Penulis



M. Raihan Ramadhanito

2151031002

RIWAYAT HIDUP



M. Raihan Ramadhanito. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 8 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Taufik Agung Julrinto dan Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.S.i., Ak. Penulis memulai pendidikan formal di SD Sekolah Alam Lampung pada tahun 2009-2015, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Global Madani pada tahun 2015-2018 dan selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur PMB Mandiri. Penulis pernah aktif menjadi anggota bidang Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sebagai Anggota Bidang Biro Dana dan Usaha Periode 2023-2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari pada Januari 2024 di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Meraksa Aji Tulang Bawang, Lampung. Penulis mengikuti kegiatan magang mandiri selama enam bulan di Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Rekan di MT Hariyono, Jakarta Selatan. Selama masa perkuliahan, penulis banyak mendapat ilmu dan pengalaman, baik akademik dan non-akademik. Dalam perjalanannya, penulis bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang membantu penulis untuk selalu berkembang. Pada akhir masa perkuliahannya, penulis melaksanakan tanggung jawab terakhirnya sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perbandingan Tingkat Korupsi dan Penerapan *E-Government* Berdasarkan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orangtuaku tercinta, Ayahanda Ir. Taufik Agung Julrinto dan Ibunda Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Terimakasih atas segala usaha dan doa yang tiada hentinya yang diberikan untuk mencapai impianku, terima kasih karena selalu senantiasa memberikan nasihat, dukungan, saran, dan motivasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat, Aamin.

Adik-Adikku tersayang, Rindwita Vania Shaumy dan Dimas Thoriq Aldiarta

Terimakasih telah memberikan doa dan dukungan, semoga Allah selalu mempermudah segala urusan kalian dan memberikan balasan yang lebih baik, Aamin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan,

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(Q.S An-Najm : 39)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Semoga segala kesulitan dan cobaan ku sekarang ini kelak akan menjadi Bahagia serta kenikmatan bagi keluargaku nanti”

“Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah”

(Lao Tzu)

“Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan”

(Steve Jobs)

“Sometimes my genius is almost frightening”

(Jeremy Clarkson)

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua rangkaian penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Perbandingan Tingkat Korupsi dan Penerapan *E-Government* Berdasarkan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya, serta senantiasa memberikan jalan dalam setiap urusan hamba-Nya
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Ir. Taufik Agung Julrinto dan Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. Yang selalu memberikan perhatian serta bimbingan tiada lelah dan dukungan baik secara moral dan materi serta doa-doa yang sangat membantu mempermudah langkah demi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.SI., AKT.. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi.
6. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.SC., Ph.D., AK., CA. Selaku Dosen Penguji Utama yang selalu memberikan bimbingan serta masukan-masukan selama proses pengerjaan skripsi.

7. Bapak Kamadie Sumanda, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terkait isi skripsi.
8. Seluruh Civitas Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Teman-teman S1 Akuntansi 2021 yang telah menemani dan memberikan semangat dalam segala kondisi pada penulis selama menjalani kuliah di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung.
10. Teman-teman yang tergabung dalam kumpulan Yahaha hayuk dan Kost N15 yang selalu memberikan dukungan dan selalu setia menemani penulis baik disaat kuliah maupun saat penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, mampu menghadapi setiap masalah yang datang, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan pahala yang berlimpah pada mereka dan menjadikannya sebagai ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 18 April 2025

Penulis

M. Raihan Ramadhanito

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Keagenan.....	10
2.2 Opini atas laporan keuangan	11
2.3 Korupsi.....	14
2.4 E-Government	15
2.5 Penelitian Terdahulu	17
2.6 Kerangka Pemikiran	24
2.7 Pengembangan Hipotesis	25
2.7.1 Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP.....	25
2.7.2 Perbedaan Penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian	29
3.4 Metode Analisis Data.....	30
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	33
4.3 Hasil Uji Normalitas Data.....	33
4.4 Hasil Uji Statistik.	35
4.4.1 Hasil Uji Statistik Hipotesis 1	35
4.4.2 Hasil Uji Statistik Hipotesis 2	36
4.4.3 Hasil Uji statistik <i>Robustness test</i>	37
4.5 Pembahasan.....	38
4.5.1 Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP	38
4.5.2 Perbedaan Penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dan Selain WTP	40
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	43
5.3 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Bobot Di Masing-Masing Indikator	17
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	29
Tabel 4 Proses Penentuan Sampel Hipotesis 1	32
Tabel 5 Proses Penentuan Sampel Hipotesis 2	32
Tabel 6 Hasil analisis statistik deskriptif uji beda	33
Tabel 7 Hasil Uji Normalitas Data Korupsi.....	34
Tabel 8 Hasil Uji Normalitas Data E-Government (SPBE).....	34
Tabel 9 Pengujian Statistik dengan Mann Whitney U test Untuk Hipotesis 1	35
Tabel 10 Pengujian Statistik dengan Mann Whitney U test Untuk Hipotesis 2.....	36
Tabel 11 Pengujian Robustness test dengan Mann Whitney U test Untuk Hipotesis 1	37
Tabel 12 Pengujian Robustness test dengan Mann Whitney U test Untuk Hipotesis 2.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023	2
Gambar 2 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023	3
Gambar 3 Diagram Data CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022	4
Gambar 4 Data Control of Corruption Indonesia Tahun 2012 – 2022	5
Gambar 5 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 OUTPUT PENELITIAN	49
Lampiran 2 DATA VARIABEL KORUPSI, OPINI, DAN E-GOVERNMENT	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur konsistensi aktivitas pemerintahannya, dan perlu untuk mengamati segala potensi maupun masalah yang kelak akan dialami oleh daerah pemerintahannya. Namun, selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat daerahnya dan lembaga yang ada dalam daerah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan memberikan informasi yang transparan mengenai hasil-hasil aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat umum. Terkait bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 terkait keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan betapa pentingnya tanggungjawab dan kewajiban untuk melaporkan semua hasil kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan ke pemerintah pusat serta pemerintahan yang terlibat tersebut melaporkannya ke khalayak umum yaitu masyarakat. Pelaporan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka manifestasi akuntabilitas serta transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua pelaporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah mendapatkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (opini) yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Masih terdapat Kabupaten/Kota yang beberapa diantaranya belum mendapatkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), bahkan opini tidak wajar. Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan bahwa Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada tahun 2023.



Gambar 1 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023.

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 1 tahun 2024

Meskipun perkembangan opini LKPD dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan WTP, namun pada level pemerintahan Provinsi mengalami penurunan opini di tahun 2023, dan pada level kabupaten lebih banyak yang mengalami penurunan WTP (sebanyak 17 kabupaten) dibandingkan kenaikan WTP (10 kabupaten). Oleh karena itu dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 2 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 – 2023
menurut pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 1 tahun 2024

Permasalahan korupsi pada pemerintah dapat dilihat berdasarkan indeks *corruption perception*. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki nilai persepsi korupsi yang rendah, dalam artian tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir (2012-2022), tingkat korupsi Indonesia mengalami stagnan, yang mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya sistem dan kebijakan anti korupsi yang dimiliki Indonesia dalam upaya menekan tingkat korupsi (Lustrilang et al., 2023). Pada tahun 2021 nilai CPI yang dimiliki Indonesia ialah sebesar 38/100 dan selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 34/100, artinya terjadi penurunan sebesar 4 poin.



Gambar 3 Diagram Data CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022

Sumber: *Transparency International* Indonesia (TII), 2023

Salah satu indikator yang berperan penting dalam mengukur dan mengevaluasi berbagai aspek terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *Control of Corruption*. *Control of Corruption* merupakan salah satu indikator tata kelola negara yang memiliki kaitan erat terhadap penilaian korupsi. Di mana *Control of Corruption* menilai sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk urusan pribadi, baik korupsi besar maupun kecil, hingga pengambilalihan negara oleh kaum elit maupun swasta. *Control of Corruption* di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2022, menunjukkan penurunan kualitas kontrol atas korupsi yang dimiliki Indonesia sehingga tidak efektif dalam menurunkan tingkat korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di waktu mendatang, sehingga memerlukan perbaikan aspek-aspek yang kompleks yang terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek hukum untuk dapat menghasilkan kontrol korupsi yang baik (Pippidi & Dadašov, 2016).

Berikut adalah *linechart* data control CPI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022:



Gambar 4 Data Control of Corruption Indonesia Tahun 2012 – 2022

Sumber: *Transparency International (2022)*

Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks pemerintahan negara. Setiap tahun, masalah korupsi terus muncul dalam berbagai skala, meskipun pemerintah telah berusaha melawannya melalui pembentukan tiga lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut adalah Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022 yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2022:



Gambar 5 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (2022)*

Hubungan antara opini laporan keuangan dan korupsi seringkali menimbulkan perdebatan, namun berkaitan dengan opini laporan keuangan dengan kualitas tata kelola, disebutkan bahwa tata kelola yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi. Karena tata Kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum. Sehingga Ketika prinsip-prinsip diterapkan secara konsisten resiko korupsi dapat diminimalkan. Namun, opini WTP tidak menjamin bahwa suatu entitas bebas dari korupsi. Karena opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, bukan atas tindak pidana korupsi. Pemeriksaan lebih fokus pada apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai standar yang berlaku. Sementara itu hubungan antara opini laporan keuangan dengan *E-Government* memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari transparansi dan akuntabilitas. Opini laporan keuangan yang baik (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. *E-Government* adalah elemen yang berpengaruh dalam melaksanakan sistem pemerintahan suatu negara sebagai tolak ukur apakah negara tersebut sudah baik (World Bank, 1996). Hal ini dikarenakan *E-Government* dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sistem pemerintahan sehingga dapat menekan ketimpangan informasi yang sering terjadi antara Masyarakat dan pemerintah. *E-Government* adalah salah satu sistem akuntansi yang mendukung tercapainya praktik *good government governance*. Dengan *E-Government* diharapkan transparansi serta akuntabilitas di Indonesia dapat meningkat. Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 berisi tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, yang dalam aturan tersebut diharuskan kepada setiap organisasi pemerintah, baik dari lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk merancang dan mengembangkan, serta mengimplementasikan *E-Government*, yang berperan sebagai wadah penyaluran informasi terhadap publik.

Penelitian terdahulu menyatakan penggunaan internet dalam pemerintahan akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Pontoh, 2018). Studi serupa tentang penerapan *E-Government* yang diukur melalui *Internet Financial*

Reporting (IFR) oleh Juniantika et al (2020) menyatakan terdapat pengaruh opini audit (Kualitas laporan keuangan) terhadap *E-Government*. Artinya terdapat perbedaan penerapan *E-Government* berdasarkan kualitas laporan keuangan. Rodríguez-Navas (2019) menyatakan bahwa penerapan *E-Government* dapat menurunkan tingkat aktivitas korupsi dalam pemerintahan. Selanjutnya menurut Tsutskiridze (2020), penerapan *E-Government* efektif dalam menurunkan tingkat korupsi. Walaupun sebagian besar institusi sudah menerapkan *E-Government* namun korupsi masih sering ditemukan. Hal ini dikarenakan keberhasilan *E-Government* tidak dapat diterapkan secara universal. Terdapat faktor organisasi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas fungsi *E-Government* dalam melawan korupsi Rustiarini (2019).

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, sebagian besar kualitas laporan keuangan di Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik dilihat dari opini WTP namun tingkat korupsi masih tinggi, padahal seharusnya sesuai dengan teori dan pernyataan riset sebelumnya oleh Kuntadi, et al. (2023) bahwa kualitas laporan keuangan (opini) pemerintah daerah yang baik akan mengurangi korupsi oleh karena itu hal ini menarik minat penulis dalam menguji apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP (Wajar Dengan Pengecualian / WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat).

Selanjutnya berdasarkan teori dan riset terdahulu menyatakan bahwa pelaporan yang lebih berkualitas berkaitan dengan peningkatan tata kelola atau *governance*. Namun berdasarkan fenomena sebelumnya yang dilihat dari data penilaian sistem pelaporan berbasis elektronik (SPBE) masih banyak pemda di Indonesia yang belum menerapkan *E-Government* secara maksimal. Hal ini yang menjadi perhatian utama penulis dalam menguji apakah terdapat perbedaan penerapan *E-Government* pada pemerintah daerah yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat). Dengan demikian maka judul skripsi ini adalah “**Perbandingan Tingkat Korupsi dan *E-Government***

Berdasarkan Opini Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat).
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan *E-Government* antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat).

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan tingkat korupsi yang signifikan antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat).
2. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan penerapan *E-Government* antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori bagaimana perbedaan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan opini non WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat). terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui

ada perbedaan dalam penerapan *E-Government* dalam pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan opini non WTP (WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat).

Manfaat praktis berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai masukan bagi kebijakan dalam memperhatikan opini LKPD dan menerapkan e-government yang dapat menurunkan tingkat korupsi.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan pertama kali oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu principal (pemilik) dan agent (manajer). Dalam konteks ini, principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola dan mengambil keputusan atas nama mereka. Teori ini penting dalam manajemen perusahaan karena mencakup dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Dalam pemerintahan, masyarakat sebagai principal memberikan wewenang kepada pejabat publik (agen) untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik. Hal ini menciptakan hubungan keagenan di mana agen diharapkan bertindak demi kepentingan rakyat

Di dalam teori keagenan terdapat asimetri informasi dimana agen sering kali memiliki lebih banyak informasi tentang kebijakan dan pengelolaan sumber daya dibandingkan principal. Hal ini dapat menyebabkan perilaku opportunistik di mana agen mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan umum. Untuk mengatasi masalah keagenan, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang kuat, dalam hal ini misalnya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban dari pemerintah melalui laporan keuangan dan evaluasi kinerja, sehingga dapat memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat (principal) mendelegasikan tanggung jawab kepada pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya publik dan menyajikan laporan keuangan yang transparan. Dalam

hal ini opini audit yang diberikan oleh auditor independen berfungsi agar rakyat dapat menilai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2 Opini atas laporan keuangan

Dalam konteks audit laporan keuangan, terdapat beberapa jenis opini yang diberikan oleh auditor, diantaranya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak menyatakan pendapat (TMP). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sementara opini wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan ketika auditor menemukan salah saji material dalam laporan keuangan tapi tidak memiliki dampak yang menyebar secara keseluruhan. Sedangkan opini tidak wajar (TW) diberikan ketika auditor menemukan salah saji material yang memiliki dampak secara keseluruhan. Selanjutnya opini tidak menyatakan pendapat (TMP) diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan opini (IHPS BPK RI, 2024).

Studi ini berdasar pada landasan teoritis yang mengatakan bahwa opini laporan keuangan memiliki peran yang penting terhadap pencegahan korupsi dalam pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa opini laporan keuangan yang baik seperti WTP dapat berperan sebagai alat pencegahan terhadap kegiatan korupsi. Merujuk pada peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 terkait standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan adalah laporan sistematis mengenai posisi keuangan serta segala transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang dimaksudkan ialah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa substansi akuntansi dan memiliki sifat wajib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan (Nordiawan, 2012). Berikut adalah beberapa substansi tersebut:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah

3. Sistem organisasi dalam lingkungan pemerintah pusat/daerah
4. Organisasi lain yang menurut peraturan perundang undangan satuan organisasi tersebut wajib untuk menyajikan laporan keuangan

Laporan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang menjelaskan secara sistematis mengenai posisi keuangan yang muncul dari transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah (Nordiawan, 2012). Kualitas laporan keuangan daerah adalah hasil dari seorang atau beberapa individu yang menilai dan merinci dari proses pengukuran, indentifikasi, pencatatan dan transaksi ekonomi yang terdapat pada pemerintah daerah dan berkaitan dengan penggunaan finansial dalam menjalankan transaksi tersebut. Tujuan umum dari akuntansi pemerintahan merupakan untuk menyediakan informasi keuangan yang valid bagi para penggunanya dan bisa diandalkan dalam pengambilan Keputusan. Laporan keuangan pemerintah disusun guna memenuhi kebutuhan akan informasi dari semua kalangan pengguna. Berikut adalah beberapa kelompok utama yang menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat
2. Perwakilan rakyat, Lembaga pemeriksa, Lembaga pengawas
3. Lembaga atau pihak yang memberikan bantuan finansial dalam kegiatan donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah

Pemerintah diharuskan untuk memberikan perhatian atas informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang akan digunakan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan Keputusan. Dalam penetapan entitas pelaporan diperlukan pertimbangan syarat pengelolaan pengendalian serta penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, serta misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban serta wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk

1. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan
2. Menilai kondisi keuangan

3. Evaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan
4. Membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemberian opini didasarkan atas kualitas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas meliputi hal berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan akan dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat menjadi tolak ukur penggunaannya dalam pengambilan Keputusan serta membantu penggunaannya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini, serta dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dan menegaskan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika laporan keuangan tersebut bebas dari makna dan definisi yang menyesatkan serta kesalahan material. Selain itu laporan keuangan harus menyajikan fakta yang actual secara jujur, serta dapat dipastikan kebenarannya.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain yang setara. Perbandingan ini dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal

4. Dapat dipahami

Akan lebih baik jika suatu laporan keuangan dapat mudah dipahami oleh setiap penggunaannya. Laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penelitian ini melibatkan konsep opini audit oleh BPK yang berperan sebagai alat ukur kualitas pelaporan keuangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa jenis opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menandakan

efektivitas praktik pelaporan keuangan mereka dan dapat menunjukkan kerentanan terhadap perilaku korupsi.

Jenis-jenis opini sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini yang diberikan jika laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material dan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Wajar dengan Pengecualian (WDP) adalah Opini yang diberikan jika laporan keuangan Sebagian besar bebas dari kesalahan material, kecuali untuk beberapa item tertentu.
3. Tidak wajar adalah Opini yang diberikan jika laporan keuangan mengandung kesalahan material dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
4. Tidak menyatakan pendapat adalah Opini yang diberikan jika auditor tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan.

2.3 Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan individual yang mencakup berbagai perilaku, berupa suap hingga pencurian dana publik (*World Bank*, 1996). Korupsi dapat terjadi dimana saja, namun biasanya korupsi kerap terjadi di sebuah negara yang memiliki institusi yang lemah dan sering kali terdampak oleh kerapuhan dan konflik. Berdasarkan atas teori agensi menjelaskan bahwa korupsi adalah kecurangan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian informasi yang terjadi antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* (Bergman & Lane, 1990). Dimana pemerintah sebagai *agent* dinilai memiliki informasi yang lebih mengenai keadaan administrasi negara sehingga dianggap memiliki akses yang lebih dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindak kecurangan. Oleh sebab itu, dalam upaya menekan asimetri tersebut, pemerintah diharuskan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang dapat membuktikan tanggungjawab pemerintah dalam kenegaraan (Chen & Aklikokou, 2019).

Korupsi sebagai suatu bentuk kecurangan atau fraud, berikut adalah 3 dorongan utama untuk melakukan Tindakan korupsi, diantaranya:

1. Tekanan

Tekanan kerap kali menjadi motivasi yang menjadi alasan untuk melakukan tindak kecurangan. Tekanan yang terjadi dapat berasal dari empat hal yaitu tekanan finansial yaitu keserakahan, standar hidup yang tinggi, hingga lilitan hutang, selain itu tekanan dapat datang dari tekanan kebiasaan buruk atau kepribadian, hingga tekanan pekerjaan (Albrecht et al., 2011).

2. Peluang

Peluang Korupsi merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Peluang ini kerap timbul atas kontrol internal yang lemah, pengawasan yang minim, serta penyalahgunaan jabatan kekuasaan. Peluang tidak hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan tertinggi karena peluang dapat diperoleh atas akses yang lebih atas informasi umum dan keterampilan teknis (Cressey, 1950)

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan sebuah pemikiran yang memberikan alasan untuk membenarkan Tindakan korupsi serta kecurangan lainnya bahwa hal yang dilakukan merupakan Tindakan yang wajar dan dapat diterima secara moral oleh Masyarakat (Cressey, 1950).

Temuan kerugian keuangan negara, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan Undang Undang 31/1999 jo 20/201 bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi.

2.4 E-Government

E-Government merupakan bentuk dalam pelayanan public oleh pemerintah disaat melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani

kebutuhan informasi public dengan memanfaatkan sarana berbasis teknologi maupun internet dan teknologi digital lainnya (Setyaningrum, 2022). *E-Government* dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk bidang yang terkait dengan sektor public baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dimana pemanfaatan teknologi informasi memiliki kaitan yang erat. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengoptimalkan pelayanan public secara efektif, transparan, efisien, serta akuntabel (Rohmatun et al., 2022). Tujuan dari penggunaan *e-government* dalam tata Kelola pemerintah daerah di Indonesia adalah untuk administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu juga agar dapat mencapai pelayanan public yang bersifat transparan dan memuaskan. Di Indonesia salah satu bentuk proksi *e-government* adalah sistem pelaporan berbasis elektronik (SPBE). Pengukuran *e-government* menggunakan indeks SPBE juga dipakai pada penelitian sebelumnya oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) dan Wulandari & Bandi (2015).

Merujuk pada Peraturan Presiden No 95 yang diterbitkan pada tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat menjadi SPBE merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada publik. Dalam perpres tersebut ada beberapa prinsip yang menjalankan SPBE. Prinsip prinsip tersebut adalah berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah bentuk optimalisasi untuk pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhannya

2. Keterpaduan

Merupakan integrasi sumber daya terkait yang mendukung SPBE.

3. Kestinambungan

Kestinambungan yang berarti SPBE harus terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Tabel 1 Jumlah Bobot Di Masing-Masing Indikator

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00

Sumber: Kemenpanrb RI, 2018

Tabel 1 diatas adalah Jumlah bobot di masing-masing indikator yang dapat menentukan nilai indeks untuk pemerintah pusat ataupun daerah. Derajat perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari dua model tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan layanan SPBE.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan literatur dalam penelitian ini:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Teori	Pengukuran Variabel
1.	Wulandari, I., & Bandi, B. (2015) Sinta 2 H2	Pengaruh <i>E-Government</i> , Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal akuntansi dan Bisnis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan implementasi <i>E-Government</i> dan tindak lanjut Penyelesaian Persentase BPK dampak signifikan positif pada opini audit BPK	Penerapan <i>e-Government</i> dianggap sebagai faktor penting yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Teori tersebut menyatakan bahwa alat digital dapat memfasilitasi	Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel inde-penden. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Opini audit BPK RI (Y), sedangkan Variabel independen da-lam penelitian ini adalah Pelaksanaan <i>E-Government</i> (X1),

				komunikasi dan efisiensi yang lebih baik dalam menangani rekomendasi pemeriksaan, sehingga menghasilkan opini pemeriksaan yang lebih baik dari BPK R	
2.	Bolívar, M., Pérez, C., & Hernández, A. (2007). Scopus Q1 H2	<i>E-Government and Public Financial Reporting The Case of Spanish Regional Governments</i>	penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pelaporan keuangan di antara pemerintah daerah Spanyol, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal keandalan, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan Internet untuk transparansi dan akuntabilitas	Public Financial Management (PFM) Theory: Teori Manajemen Keuangan Publik (PFM): Penelitian ini menggabungkan prinsip-prinsip dari PFM, yang menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat dalam mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang baik.	pengukuran variabel dalam penelitian ini melibatkan kombinasi penilaian kualitatif, kuesioner terstruktur, dan metode penilaian sistematis untuk mengevaluasi transparansi dan kualitas pelaporan keuangan publik oleh pemerintah daerah di Spanyol
3.	Rini., Adhariani, Sarah. (2015) Sinta 1 H1	Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia.	Dalam penelitian ini ditemukan sedikit keterkaitan antara tingkat pengungkapan LKPD dan tingkat korupsi yang dilihat dari 54% Kabupaten yang terindikasi TPK memiliki skor tingkat pengungkapan LKPD yang lebih rendah dibandingkan skor tingkat	Teori Agensi: Teori ini membahas hubungan antara prinsipal (warga negara) dan agen (pejabat pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa agen mungkin bertindak demi kepentingan mereka sendiri dan bukan demi kepentingan prinsipal, sehingga	Penelitian ini menguji hubungan antara kualitas pelaporan keuangan, opini audit, dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Pengukuran variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi

			<p>pengungkapan rata-rata LKPD Kabupaten seluruh Indonesia. Pada penelitian ini pula diketahui bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi. Dengan data yang didapat oleh peneliti dapat dilihat bahwa 97% kabupaten (68% WDP, 26% TMP dan 3% TW) yang terkena kasus korupsi merupakan kabupaten yang memiliki opini tidak baik baik. Kabupaten yang memiliki opini WTP DPP hanya sebesar 3,2% yang terkait kasus korupsi tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi.</p>	<p>berpotensi menimbulkan korupsi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam opini audit, kurangnya korelasi antara pengungkapan keuangan dan opini tersebut menunjukkan bahwa agen masih dapat mengeksploitasi posisi mereka, sehingga mengakibatkan peningkatan korupsi.</p>	
4.	<p>Yudi, Avalon, Idrus., Noer, Azam, Achsan., Arief, Tri, Hardiyanto. (2018). SINTA 2 H1</p>	<p>THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (BPK) OPINION WITH REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi di kalangan pejabat pemerintah daerah merupakan hal yang lazim dan bervariasi secara signifikan antar provinsi, yang pada gilirannya</p>	<p>Adjacent Category Logistic Model: Penelitian ini menggunakan model logistik kategori berdekatan untuk menganalisis hubungan antara opini BPK dan korupsi.</p>	<p>Variabel respon utama adalah opini BPK yang dilambangkan dengan Y. Variabel ini diukur menggunakan skala ordinal dengan empat kategori yang mencerminkan perbedaan tingkat opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.</p>

		REPORT AND CORRUPTION	mempengaruhi penilaian kinerja keuangan oleh BPK. Pengkategorian provinsi ke dalam zona korupsi yang berbeda memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi permasalahan ini secara efektif.	Pendekatan statistik ini memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap variabel respon yang bersifat ordinal, sehingga memberikan wawasan mengenai bagaimana berbagai faktor mempengaruhi penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	Kategorinya cenderung berkisar dari opini yang tidak menguntungkan hingga yang menguntungkan, yang menunjukkan kualitas praktik pengelolaan keuangan
5.	Tingting, Liu., Yu, Liu., Barkat, Ullah., Zuobao, Wei., Lixin, Colin, Xu. (2021). Scopus Q1 H1	The dark side of <i>transparency</i> in developing countries: The link between financial reporting practices and corruption.	Studi ini menemukan korelasi positif yang kuat antara produksi laporan keuangan yang diaudit dan hambatan korupsi yang dihadapi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memproduksi AFS mungkin menghadapi tantangan korupsi yang lebih tinggi	Nash Equilibrium in Disclosure: Makalah ini juga menyentuh konsep keseimbangan Nash dalam konteks pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin berada dalam keseimbangan yang tidak efisien secara sosial di mana biaya pengungkapan lebih besar daripada manfaatnya, khususnya di lingkungan dengan tingkat korupsi yang tinggi.	Corruption Obstacles (CorruptionObstacle): ini adalah variabel dependen utama, yang diukur berdasarkan tanggapan yang dilaporkan sendiri terhadap pertanyaan Survei Perusahaan Bank Dunia (WBES): "Seberapa problematis korupsi dalam operasional perusahaan saat ini?"
6.	Sutopo, B., Wulandari,	<i>E-Government, Audit Opinion,</i>	Hasil penelitian menunjukkan	Kerangka teoritis makalah ini	penelitian ini menggunakan

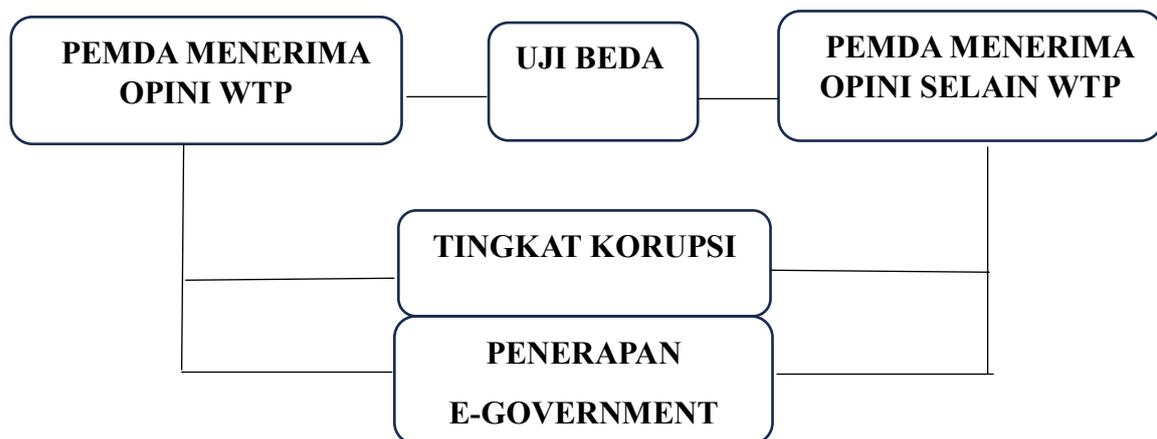
	T., Adiati, A., & Saputra, D. (2017). Sinta 3 H2	and Performance of Local Government Administration in Indonesia	bahwa opini audit berhubungan positif dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang menerima opini audit yang baik cenderung mempunyai kinerja yang lebih baik dalam tugas administratifnya. Studi tersebut menekankan bahwa opini audit dapat berfungsi sebagai indikator penting kinerja	mengintegrasikan konsep <i>E-Government</i> , audit opini, dan pengukuran kinerja dalam konteks administrasi pemerintahan daerah di Indonesia, dengan menyoroti keterhubungan dan implikasinya terhadap tata kelola.	pendekatan terstruktur untuk mengukur <i>E-Government</i> , opini audit, dan kinerja pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa setiap variabel dinilai melalui metrik yang dapat diandalkan dan terstandarisasi.
7.	Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Sinta 3	Factors Affecting the Corruption Rate: Audit Opinion, Audit Findings, and Follow-up of Audit Results	The study indicates that the audit opinion plays a significant role in influencing the level of corruption. A favorable audit opinion can enhance accountability and transparency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit mempunyai peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Opini audit yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,	Opini Audit sebagai Konstruksi Teoritis: Makalah ini berpendapat bahwa opini audit berfungsi sebagai konstruksi teoritis penting yang mempengaruhi tingkat korupsi. Opini audit yang positif diteorikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, yang dapat mengurangi praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa evaluasi eksternal dapat mencegah perilaku tidak etis	studi ini mengukur variabel-variabel utamanya—opini audit, temuan audit, tindakan tindak lanjut, dan tingkat korupsi—melalui kombinasi penilaian kualitatif dan metrik kuantitatif. Pendekatan komprehensif ini memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi untuk mempengaruhi tingkat korupsi.

			sehingga berpotensi mengurangi tingkat korupsi., thereby potentially reducing corruption levels.	dengan meningkatkan pengawasan	
8	Kurniawati, A., & Pratama, Y. (2021). Sinta 2	The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia	Hasil penelitian menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Nilai t t variabel ini sebesar 0,552 dengan signifikansi 0,582 lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) tidak diterima, yang berarti bahwa opini audit wajar tanpa pengecualian tidak menjamin bebas dari korupsi	Opini Audit dan Akuntabilitas Keuangan: Opini audit berfungsi sebagai penilaian profesional atas kewajaran laporan keuangan. Makalah ini berpendapat bahwa meskipun opini audit yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, hal ini tidak menjamin bebasnya korupsi. Hal ini menyoroti keterbatasan dalam hanya mengandalkan opini audit sebagai ukuran akuntabilitas	Audit Opinion: This variable reflects the professional judgment regarding the fairness of the financial statements presented by provincial governments. It is measured using a dummy variable, where a score of 1 indicates an unqualified opinion (indicating good financial management), and a score of 0 indicates a qualified opinion, unfair opinion, or disclaimer. This measurement is crucial as it provides insights into the perceived reliability of financial reporting by local governments
9	Novitasari, E., Dewi, F., & Oktavia, R. (2022) Sinta 3 H2	Determinants of <i>E-Government</i> Implementation in Indonesia	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Opini Audit, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat semuanya berpengaruh positif terhadap penerapan <i>E-</i>	kerangka teori makalah ini mengintegrasikan teori keagenan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dampak pendidikan publik, dan teori sumber daya keuangan untuk menjelaskan	Opini Audit: Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana nilai 1 diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 0 untuk pemerintah daerah

			<i>Government</i> . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari faktor-faktor ini berkontribusi terhadap praktik <i>E-Government</i> yang lebih baik	faktor-faktor penentu implementasi <i>E-Government</i> di Indonesia. Teori-teori ini secara kolektif menyoroti keterkaitan antara akuntabilitas pemerintah, harapan masyarakat, dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk keberhasilan inisiatif <i>E-Government</i> .	yang tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif terhadap implementasi <i>E-Government</i> , mencerminkan pentingnya akuntabilitas keuangan dalam meningkatkan layanan <i>E-Government</i> .
10	Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2016) Scopus Q1	Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians	hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa audit pemerintah dapat secara efektif mengurangi korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas dan mengubah biaya yang terkait dengan perilaku korupsi.	Ringkasnya, kerangka teoritis makalah ini mengintegrasikan teori keagenan politik dengan wawasan tentang akuntabilitas peradilan dan dinamika ekstraksi rente, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana audit pemerintah dapat mengurangi korupsi secara efektif.	Jumlah Penyimpangan: Variabel ini mengukur jumlah penyimpangan yang ditemukan selama audit. Hal ini berfungsi sebagai indikator langsung tingkat kesalahan manajemen dan korupsi di kota-kota yang diaudit
11	Budiman, M., & Amyar, F. (2021) Sinta 3	The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of	Opini Audit dan Korupsi: Studi ini menemukan bahwa opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berpengaruh signifikan	Ringkasnya, kerangka teoritis penelitian ini menggabungkan teori keagenan, yang membahas hubungan prinsipal-agen dan konflik yang diakibatkannya,	Ringkasnya, variabel pengukuran dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap hubungan kompleks antara proses audit dan tingkat korupsi, dengan penekanan khusus pada peran

		the Republic of Indonesia	terhadap tingkat korupsi. Bahkan kementerian yang menerima opini wajar tanpa pengecualian tidak boleh berasumsi bahwa kementerian tersebut bebas dari praktik korupsi, karena penelitian menunjukkan bahwa opini tersebut bukanlah indikator integritas yang dapat diandalkan.	dengan teori kesenjangan harapan, yang menekankan perbedaan antara harapan publik dan hasil audit. Secara keseluruhan, teori-teori ini memberikan perspektif yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di kementerian dan lembaga di Indonesia.	signifikan temuan kerugian negara dalam mengindikasikan adanya korupsi di kementerian dan lembaga di Indonesia.
--	--	---------------------------	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

Penelitian Rini et al. (2015) menunjukkan bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Selanjutnya menurut Liu (2021) mengungkapkan bahwa transparansi memiliki paradoks di negara-negara berkembang, yang menekankan bahwa meskipun transparansi itu penting dan penerapannya harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari memfasilitasi korupsi secara tidak sengaja. Opini laporan keuangan diyakini memiliki kontribusi serta keterkaitan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah, namun belum banyak studi yang meneliti hal tersebut, salah satu studi yang meneliti pengaruh opini audit terhadap tingkat kasus suap dan korupsi adalah Avis et al. (2018) yang menyatakan bahwa area yang sudah mendapatkan opini audit cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah sekitar 8% jika dibandingkan dengan area yang belum mendapatkan opini audit. Berdasarkan penelitian oleh Kuntadi, et al. (2023) menunjukkan bahwa opini audit berperan besar dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Opini audit yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga berpotensi mengurangi tingkat korupsi.

Publik mempertimbangkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK atas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu jika hal tersebut benar adanya maka seharusnya pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP oleh BPK seharusnya bebas dari masalah fraud atau korupsi. Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus penyimpangan terutama korupsi yang marak terjadi dalam pemerintah daerah. Menurut Yudi et al. (2018). Adanya korelasi yang signifikan antara tingkat korupsi di kalangan kepala daerah dan opini yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Provinsi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi cenderung menerima opini BPK yang kurang baik, sehingga hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap persepsi kinerja keuangan. Menurut Ruki (2012)

penting untuk menguji kembali hubungan antara opini oleh BPK dengan tindak kriminal korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala pemerintahan lokal.

Selanjutnya,

Hasil penelitian Aghae (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara korupsi dan kualitas pelaporan keuangan, mendemonstrasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik dapat mengurangi tingkat persepsi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya hasil penelitian oleh Liu (2021) menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas pelaporan keuangan dan indikator korupsi, khususnya Indeks Persepsi Korupsi, pengendalian korupsi, dan ukuran akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, tingkat korupsi cenderung menurun. Aghae (2022) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat mengurangi tingkat korupsi, penelitian ini berdasarkan premis bahwa informasi pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Diharapkan tingkat korupsi pemda yang menerima opini WTP lebih rendah dibandingkan pemda yang memiliki opini NON WTP. Berdasarkan logika berfikir dan hasil dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat korupsi pada pemda yang mendapat opini WTP lebih rendah dibanding pemda yang mendapat opini selain WTP.

2.7.2 Perbedaan Penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

E-Government merupakan singkatan dari elektronik government. *E-Government* biasa dikenal E-Gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi (Lenak et al., 2021). Menurut (Indrajit, 2002) *E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-Government* diyakini sebagai salah satu cara yang ampuh

dalam *good governance*. Penggunaan internet dalam pemerintahan telah diatur untuk mendukung pemerintahan agar bisa membangun serta mengembangkan website untuk mempresentasikan informasinya kepada public (Pontoh, 2018). Dalam penelitian sebelumnya oleh Juniantika et al. (2020) mengenai *Internet Financial Reporting* (IFR) telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IFR sebagai proksi *E-Government*. Metode yang digunakan adalah ukuran, manfaat, belanja modal, dan opini audit dari BPK RI. Hasilnya menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh pada IFR (*E-Government*), artinya terdapat perbedaan *E-Government* berdasarkan opini laporan keuangan. Selanjutnya menurut Wulandari dan Bandi (2015) menemukan bahwa penerapan *E-Government* berpengaruh positif signifikan terhadap opini pemeriksaan yang dikeluarkan BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan teknologi dapat meningkatkan opini. Demikian pula Novitasari et al. (2022) menyatakan Opini Audit berpengaruh positif terhadap penerapan *E-Government*. Demikian pula Bolívar et al. (2007) menyatakan pentingnya memanfaatkan teknologi *E-Government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga diharapkan pemda yang memiliki opini WTP memiliki penerapan *E-Government* yang lebih baik. Berdasarkan logika berfikir dan hasil dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penerapan *E-Government* pada pemda yang mendapat opini WTP lebih baik dibanding pemda yang mendapat opini selain WTP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021 hingga 2023 dan telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data sekunder. Data opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP-BPK RI) atas LKPD yang berupa Opini Tahun 2021-2023. Data korupsi atau kerugian negara diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI dan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau E-PPID BPK RI (<https://e-ppid.BPK.go.id/>). Sedangkan data penerapan *E-Government* (SPBE) diperoleh dari Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (<https://menpan.go.id/site/kelembagaan/buku-laporan-pelaksanaan-pemantauan-dan-evaluasi-SPBE>) dan <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6886-6-laporan-hasil-evaluasi-SPBE-tahun-2023>

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berjumlah 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota per tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, atau disebut juga *Census*. Teknik sampling

jenuh menurut Sekaran (2016) adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi yang relevan dalam penelitian diikutsertakan sebagai sampel.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut ini peneliti menyajikan terkait cara mengukur variabel dependen dan independen dalam Tabel 3

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Korupsi	penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan individual yang mencakup berbagai perilaku, berupa suap hingga pencurian dana publik (World Bank, 1996).	Temuan kerugian negara oleh BPK RI	Nominal
2	<i>Penerapan E-government</i>	<i>E-Government</i> merupakan bentuk dalam pelayanan public oleh pemerintah disaat melaksanakn tugasnya dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani kebutuhan informasi public dengan memanfaatkan sarana berbasis teknologi maupun internet dan teknologi digital lainnya (Setyaningrum, 2018)	SPBE diukur menggunakan Predikat indeks SPBE 1. 4,2-5,0 = Memuaskan 2. 3,5-<4,2 = Sangat Baik 3. 2,6-<3,5 = Baik 4. 1,8-<2,6 = Cukup 5. <1,8 = Kurang Sumber: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Interval, data diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi
3	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini laporan keuangan memiliki peran yang penting terhadap pencegahan korupsi dalam pemerintah	Kriteria Pengukuran: Kelompok 1: WTP Kelompok 2: Selain WTP (WDP, Tidak	Nominal

		daerah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pelaporan keuangan yang baik dapat berperan sebagai alat pencegahan terhadap kegiatan korupsi (Rakhman, 2023)	Wajar, Tidak Memberikan Pendapat)	
--	--	--	-----------------------------------	--

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan karakteristik dasar dari suatu dataset, seperti ukuran data (mean, median, dan modus), indikator penyebaran data (seperti rentang, varian, dan simpangan baku), serta distribusi frekuensi. Sekaran (2016)

3.4.2 Uji Statistik Hipotesis

Sebelum melakukan uji beda, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui normalitas data, apakah data parametrik atau non parametrik. Uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian ini menggunakan *Independent T-test* karena membandingkan pasangan data yang berbeda. Jika data normal (parametrik) maka uji beda menggunakan *Independent T-test*, namun jika data tidak normal (non parametrik) maka menggunakan uji *mann whitney U test*.

3.4.3 Uji Beda

Uji beda merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok data berpasangan. *Independent T-test*

digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada sampel yang sama namun dengan perlakuan dan pengukuran yang berbeda. Sebelum dilakukan uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Jika data normal (parametrik) maka uji beda menggunakan *Independent T Test*, namun jika data tidak normal (non parametrik) maka menggunakan uji *Mann Whitney U test*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji beda menggunakan *Mann Whitney U test* yang dilakukan, diperoleh hasil perbedaan yang signifikan pada tingkat korupsi dan penerapan *E-Government* antara pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dan NON WTP. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Opini laporan keuangan, Korupsi, dan penerapan *E-Government* Opini laporan keuangan menggunakan data opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dari tahun 2021-2023, sedangkan untuk korupsi menggunakan data kerugian negara dari tahun 2021-2023 dan berdasarkan Undang Undang 31/1999 jo 20/201 bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi sehingga kerugian keuangan negara sebagai alat ukur korupsi dalam penelitian ini sudah sesuai. Kemudian penerapan *E-Government* menggunakan data penilaian SPBE dari tahun 2021-2023. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Terdapat hasil perbedaan tingkat korupsi yang signifikan terhadap pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP. Pemerintah yang memiliki Opini WTP cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang memiliki Opini non WTP. Dengan Demikian hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan tingkat korupsi antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP
2. Terdapat hasil perbedaan penerapan *E-Government* yang signifikan pada pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP, Pemerintah daerah yang memiliki opini WTP Cenderung memperoleh penilaian SPBE

yang lebih tinggi atau penerapan *E-Government* yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki opini non WTP. Dengan Demikian hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan penerapan *E-Government* antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Untuk variabel korupsi penelitian ini menggunakan proksi kerugian negara yang masih merupakan temuan BPK, bukan menggunakan data dari Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung dikarenakan data tersebut memiliki kesulitan dalam pengambilan data karena putusan dalam mahkamah agung yang terdiri dari beberapa tahun putusan yang tidak sesuai dengan periode pelaporan sehingga akan sulit untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tahunnya.

Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini mengambil data SPBE seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tanpa mempertimbangkan faktor ketertinggalan daerahnya. Karena itu hal ini menjadi salah satu sebab adanya ketimpangan nilai SPBE yang diperoleh antara Pemerintah Daerah tersebut.

5.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain korupsi dan egov seperti sistem pengendalian internal atau kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah untuk menjelaskan perbedaan karakteristik pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dan non WTP.
2. Penelitian ini telah menggunakan data seluruh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) selama tiga tahun (2021-2023), penelitian selanjutnya dapat melakukan klasterisasi populasi berdasarkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk mendeskripsikan hasil yang lebih rinci.

3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan pengukuran korupsi yang lain seperti data dari Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung yang mana data ini masih belum bisa untuk diperoleh hingga belum digunakan dalam penelitian ini.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi selain SPBE untuk mengukur *E-Government*.
5. Penelitian selanjutnya agar dapat mengklasifikasikan pemerintah daerah berdasarkan level SPBE antara daerah yang telah maju dan daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2016). Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians. *Journal of Political Economy*, 126, 1912 - 1964. <https://doi.org/10.1086/699209>.
- Albrecht, C., Kranacher, M., & Albrecht, S. (2011). Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention.
- Budiman, Muhamad & Amyar, Firdaus. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. 7. 113-129. 10.28986/jtaken.v7i1.471.
- Bolívar, M., Pérez, C., & Hernández, A. (2007). E-Government and Public Financial Reporting The Case of Spanish Regional Governments. *The American Review of Public Administration*, 37, 142-177. <https://doi.org/10.1177/0275074006293193>.
- Cressey Andersen, E.S., & Jessen, S.A. (2003). Project Maturity in Organizations. *International Journal of Project Management*, Vol. 21, pp.457-461.
- Conover, W. J. (1999). *Practical NONparametric statistics*. John Wiley & Sons.
- Juniantika, Dhita & Hapsari, Dini. (2020). What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*. 3. 102-116. 10.24815/jaroe.v3i2.17235.
- Pontoh, T., Grace., Yohanis, Rura., Abdul, Rahman., Muhammad, Achyar, Ibrahim. (2018). (7) Internet Financial Reporting Of Public Institutions and E-Government as a Medium of Good Governance in Indonesia. *Journal of Finance and Banking Review* doi: 10.35609/JFBR.2018.3.3(1)
- Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. *Aptikom*.
- Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors Affecting the Corruption Rate: Audit Opinion, Audit Findings, and Follow-up of Audit Results. *Journal of Accounting and Finance Management*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v4i1.189>.

- Kurniawati, A., & Pratama, Y. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>.
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), 2021
- Mohaamad, ali, aghae., Javad, Rezazadeh., Morteza, Bayat. (2022). Investigating the Impact of Financial Reporting Quality on Corruption (Corruption Perceptions Index, Corruption Control and Accountability) in 8 Middle Eastern Countries. *ارزشی حسابداری و رفتاری*, 6(12):98-125. doi: 10.52547/aapc.6.12.98
- Mungiu-Pippidi, A. (2023). Rethinking Corruption. <https://doi.org/10.4337/9781800379831>
- Novitasari, E., Dewi, F., & Oktavia, R. (2022). Determinants of *E-Government* Implementation in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1930656>
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat.
- Pippidi, A., & Dadašov, R. (2016). Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity. *European Journal F Criminal Policy and Research*, July.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rini, Rini., Adhariani, Sarah. (2015). (1) Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*, doi: 10.15408/ETK.V13I1.1875
- Rodríguez-Navas, P. M., & Breijo, V. R. (2019). Evaluating and Fostering Transparency in Local Administrations. *Análise social*, 54(233 (4), 827-862.
- Rustiarini, N. W. (2019). The role of e-government in reducing corruption: A systematic review. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i3.8311>
- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). Law , Development & Justice Review Pengoptimalan *E-Government* Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review. *Law, Development & Justice Review*, 5(3), 237–247.
- Ruki, T. (2012). *Korupsi tidak wajar tanpapengecualian*. Retrieved from:<http://www.dpd.go.id/artikel-korupsitidak-wajar-tanpa-pengecualian>.
- Sutopo, B., Wulandari, T., Adiati, A., & Saputra, D. (2017). *E-Government*, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia. *The Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 11, 6-22. <https://doi.org/10.14453/AABFJ.V11I4.2..>

- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2016) *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan*. Edisi ke-7, Wiley & Sons, West Sussex.
- Setyaningrum Irwansyah, Hidayati, T., & Hudayah, S. (2022). The effect of *E-Government* on local government performance accountability in Indonesia. *International journal of ebusiness and egovernment studies*, 14(2), 126–147.
- Tingting, Liu., Yu, Liu., Barkat, Ullah., Zuobao, Wei., Lixin, Colin, Xu. (2021). (6) The dark side of *transparency* in developing countries: The link between financial reporting practices and corruption. *Journal of Corporate Finance*, doi: 10.1016/J.JCORPFIN.2020.101829
- Tsutskiridze, Maksym & Bereza, Anatoliy. (2020). THE IMPACT OF E-GOVERNMENT ON THE LEVEL OF CORRUPTION. *Baltic Journal of Economic Studies*. 6. 93-99. 10.30525/2256-0742/2020-6-2-93-99.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/are>
- World Bank. (1996). Worldwide Governance Indicators. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh *E-Government*, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal akuntansi dan Bisnis* , 15, 148-157. <https://doi.org/10.20961/JAB.V15I2.184>
- Yuniasih, Dwi, Astuti., Vid, Adrison. (2019). (4) The audit board of republic of Indonesia opinion and bribery in local governments in Indonesia. doi: 10.28986/JTAKEN.V5I2.379
- Yudi, Avalon, Idrus., Noer, Azam, Achsani., Arief, Tri, Hardiyanto. (2018). (12) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (BPK) OPINION WITH REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT AND CORRUPTION. doi: 10.28986/JTAKEN.V4I1.168